

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja (LKj) Bappeda Provinsi Papua Tahun 2023 merupakan rangkaian dari mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja Bappeda yang diawali dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2019-2023, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2023. Seluruh tahapan tersebut dipertanggungjawabkan tingkat pencapaian target-target kinerjanya pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada akhir periode RPJMD Provinsi Papua

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Papua yang pada akhirnya bermuara pada pencapaian visi misi Pemerintah Provinsi Papua. Pada pembahasan pengukuran kinerja atas kebijakan, program maupun kegiatan dilakukan dengan membandingkan rencana dengan realisasinya dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja diuraikan melalui pengukuran pencapaian sasaran.

3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Papua

Pengukuran Indikator Kinerja Utama pemerintah Provinsi Papua Periode 2019-2023 diambil dari Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2019-2023. Pemerintah Provinsi Papua memiliki 5 misi dan 33 formulasi indikator kinerja utama. Bappeda Provinsi Papua bertanggungjawab pada Misi ke 3 yaitu Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Misi ke 4 yaitu Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai potensi unggul lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural dan berkelanjutan. Tiga indikator Utama menjadi tanggungjawab Bappeda dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan Provinsi Papua.

Tabel 3.1
Formulasi Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan, Sumber data Alasan)
Misi 3 : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak
		Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD	$\frac{\text{Jumlah program APBD Tahun berkenan sesuai RKPD}}{\text{Jumlah Program APBD yang harus dilaksanakan tahun berkenan}} \times 100\%$
Misi 4 : Penguatan Dan Percepatan Perekonomian Daerah Sesuai Potensi Unggulan Lokal Dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural Dan Berkelanjutan			
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya saing daerah	Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB)	$\frac{\text{PDRB}(t+1) - \text{PDRB}(t)}{\text{PDRB}(t)} \times 100\%$
		Laju Inflasi	Dimana : t+1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya $[\{(1 + \Delta \text{Inf}1)(1 + \Delta \text{Inf}2)(1 + \Delta \text{Inf}t)\} 1/t] - 1$ Dimana : ΔInf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi.
		PDRB Per kapital	$\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan tahun}}$

Tabel 3.2
Realisasi Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Misi 3 : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan					
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	1 Dok	1 Dok	100%
		Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPMD	100 %	85%	84,2%
		Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	100%	100%
Misi 4 : Penguatan Dan Percepatan Perekonomian Daerah Sesuai Potensi Unggulan Lokal Dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural Dan Berkelanjutan					
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya saing daerah	Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB)	5,91	5,22	88,32%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Laju Inflasi	2,34	1,65	70,51
		PDRB Per kapital	45,35	47,65	105,07

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, karakteristik indikator kinerja Bappeda bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

- Capaian kinerja >95% - 100% = Sangat Berhasil
- Capaian kinerja >80% - 95% = Berhasil
- Capaian kinerja >50% - 80% = Cukup Berhasil
- Capai Capaian < 50% = Kurang Berhasil

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah ditetapkan sasaran strategis yang akan dicapai serta telah ditetapkan target kinerja sesuai dengan indikator kinerja pada sasaran strategis. Adapun hasil pencapaian target kinerja pada sasaran strategis Bappeda Provinsi Papua untuk tahun 2023 terdapat pada tabel berikut ini:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel. 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPDP	100%	98%	98%
		Penjabaran konsistensi Program RKPDP kedalam APBD	100%	95%	95%
2.	Meningkanya Kualitas Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Ketersediaan data pembangunan daerah	100%	85%	85%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
3.	Meningkatnya Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Prosentase SKPD dalam Penyerapan dan Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan	100%	100%	100%
4.	Implementasi Tata Ruang Secara Konsisten	Prosentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Perda RTRW	87%	85%	97%
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	75%	80%	80%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa secara keseluruhan realisasi kinerja Bappeda Provinsi Papua dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 belum mencapai target dari 5 (lima) sasaran yang terdiri dari 6 (enam) indikator. Indikator sasaran pertama yaitu Persentase Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD teralisasi sebesar 100 persen bila dibandingkan dengan target capaian kinerja belum mencapai target. Terjadi pemutakhiran data program kegiatan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, telah terjadi perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ke dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang di ubah lagi ke dalam Kepmendagri 900.1.15-5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD menunjukkan capaian 98%, Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD mencapai 95% menunjukkan capaian kinerja dibawah 100% dan 95%, Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyediaan Data Pembangunan Daerah dengan indikator Ketersediaan data pembangunan daerah menunjukkan capaian 85%, Sasaran Meningkatnya Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator Prosentase SKPD dalam Penyerapan dan Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan mencapai 85% dengan capaian 97%, sasaran Implementasi Tata Ruang

Secara Konsisten realisasi mencapai 75% dengan capaian 80%, sedangkan Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah mencapai 80% dengan capaian 80%

Perhitungan persentase pencapaian target kinerja menggunakan cara semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penerapan rumus digunakan untuk menghitung persentase capaian pada seluruh indikator. Tingkat pencapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan 2023

Pencapaian kinerja tahun 2023 merupakan bagian dari kinerja strategis Bappeda sebagaimana yang tercantum pada Renstra 2019-2023. Pencapaian kinerja tahun pertama Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun kedua Renstra untuk mengetahui kinerja Bappeda meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target		Realisasi	
			2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	90%	100%	89%	98%
		Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD	90%	100%	90%	95%

2.	Meningkanya Kualitas Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan data pembangunan daerah	90%	100%	85%	85%
3.	Meningkatnya Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Prosentase SKPD dalam Penyerapan dan Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan	80%	100%	75%	100%
4.	Implementasi Tata Ruang Secara Konsisten	Prosentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Perda RTRW	75%	87%	70%	85%
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	85%	75%	70%	80%

Berdasarkan tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023, Pencapaian sasaran indikator penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD pada tahun 2022 realisasi sebesar 90% sedangkan pada tahun 2023 realisasi sebesar 100%. Indikator Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD pada tahun 2022 realisasi sebesar 90% sedangkan tahun 2023 realisasi sebesar 95%. Indikator sasaran 1 tidak mencapai 100% karena masih terdapat beberapa program yang belum selaras/konsisten antara RPJMD dengan RKPD. Indikator Persentase Ketersediaan data pembangunan daerah pada tahun 2022 realisasi sebesar 85% kurang dari target sedangkan tahun 2023 realisasi sebesar 85%, jika dilihat mengalami peningkatan tetapi kurang dari target yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa ada data yang belum tersedia dan belum update. Indikator persentase SKPD dalam Penyerapan dan Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2022 realisasi mencapai 75% sedangkan tahun 2023 realisasi sebesar 100%, perbandingan realisasi masih sama dengan tahun sebelumnya, Indikator persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan PERDA RTRW, perbandingan realisasi tahun 2022 sebesar 70% sedangkan 2023 sebesar 85% hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan realisasi Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2022 mendapat kategori “B” dengan capaian sebesar 70% sedangkan tahun target kinerja sebesar 80%

c. Perbandingan Capaian Tahun 2023 dan Target Restra Tahun 2019-2023

Persentase realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target tahunan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel, 3.5

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Target Renstra Tahun 2019-2023

Sasaran	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah (%)					Realisasi Capaian (%)					Persentase Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	80	85	90	95	100	80	80	75	80	98	100	94	98,9	84,2	98
		90	85	90	95	100	90	83	75	80	95	100	93	100	100	95
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan data pembangunan daerah	85	85	90	95	100	-	80	85	90	85	90	94	94,4	95	85
Meningkatnya Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	80	80	85	90	100	90	75	75	80	100	113	81	95	95	100
Implementasi Tata Ruang Secara Konsisten	Prosentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Perda RTRW	-	70	75	-	87	-	68	70	-	85	-	97	93,3	-	97
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80	80	85	85	75	51	52	60	80	64	64.05	70	75	80	80

Berdasarkan Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Target Renstra Tahun 2019-2023 diketahui bahwa sasaran : (1) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator sasaran Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD menunjukkan rata-rata capaian sebesar 98 persen dan Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD Sampai dengan tahun 2023 menunjukkan rata-rata capaian sebesar 95 persen, (2) Meningkatnya Kualitas Penyediaan Data Pembangunan Daerah dengan indikator sasaran Persentase Ketersediaan data pembangunan daerah menunjukkan rata-rata capaian sebesar 85 persen; (3) Meningkatnya Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan daerah, dengan indikator Meningkatnya Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah; menunjukkan rata-rata capaian sebesar 100 persen; (4) Implementasi Tata Ruang Secara Konsisten dengan indikator sasaran Prosentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Perda RTRW, menunjukkan rata-rata capaian sebesar 97 persen. Dari ke 4 sasaran diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan program kegiatan terkait sasaran tersebut pada kategori berhasil dalam memenuhi target RPJMD.

Sedangkan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah menunjukkan rata-rata capaian sebesar 80 persen, namun berdasarkan penilaian hasil evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua sampai dengan tahun 2023 capaian kinerja Bappeda masih dikategorikan “Baik”, dengan nilai angka sebesar 80 persen, hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas kinerja Bappeda sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan/kegagalan yang dihadapi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Penyebab Keberhasilan:

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA
2. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
3. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA
4. Dukungan Sumber Daya Manusia yang berkomperen dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian
5. Dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda
6. Ketepatan perencanaan dan penetapan target serta ssaran pembangunan daerah secara menyeluruh
7. Ketersediaan data-data pendukung dalam menetapkan sasaran pembangunan daerah serta perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan

Penyebab Kegagalan:

1. Masih kurangnya kesadaran aparat pemda dalam menyusun dan menggunakan dokumen perencanaan untuk kebutuhan pembangunan daerah;
2. Belum tersedianya perdasai tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana;
3. Belum terciptanya keselarasan penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilakukan dengan pendekatan Politik, Teknokrat, Partisipatif, Atas-bahwa (*Top Down*) dan bawah-atas (*bottom up*) termasuk pendekatan budaya khas Papua;
4. Belum terciptanya keselarasan Perencanaan Pembangunan dengan amanat OTSUS mendorong Perlindungan, Keberpihakan dan Pemberdayaan Orang Asli papua;
5. Belum optimalnya penerapan perencanaan pembangunan partisipatif pada setiap tahapan dan jejang pemerintahan di Provinsi Papua;
6. Belum terciptanya Perencanaan dan Penganggaran Tahun Daerah maupun SKPD yang berbasisi kinerja;
7. Belum memadaninya data dasar pembangunan dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

8. Belum optimalnya Sinergi Perencanaan Pembangunan di Daerah baik secara vertikal maupun horizontal, termasuk antara Pemerintah dengan Mitra Pembangunan
9. Masih terlambatnya penyusunan rencana kerja pemerintah daerah dari kalender perencanaan secara nasional;
10. Terjadinya perubahan aturan yang menyebabkan tidak konsistensinya program kegiatan pada RPJMD ke dalam RKPD
11. Belum sinerginya dokumen-dokumen perencanaan, yakni antara RPJMD-RKPD, dan RKPD-RKA/DPA, serta keseluruhan dokumen perencanaan dengan RTRW Provinsi Papua;
12. Belum optimalnya kompetensi SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja;
13. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian;
14. Sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan;

Alternatif Solusi yang telah dilakukan:

Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala dan hambatan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan
2. Penyusunan rencana pembangunan
3. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan daerah
4. Penyediaan data yang up to date
5. Peningkatan SDM melalui pelatihan dan sosialisai terkait dokumen perencanaan

e. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisi program/kegiatan Bappeda Provinsi Papua Tahun 2023 yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Tabel. 3.6
Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2023

Kode Rekening	Nama Program	Capaian Kinerja	
		Fisik (%)	Keuangan (%)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1-03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1-03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	97,6	83,95
1-03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	97,6	83,58
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
5-01	PERENCANAAN		
5-01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	91,32	84,86
5-01.01.1.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,85	99,49
5-01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	99,94	55,6
5-01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99	98,3
5-01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	99,69
5-01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98	96,97
5-01.01.1.09	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	96	95,95
5-01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	100	98,14
5-01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100	99,12
5-01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	99,71
5-01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	99	96,26
5-01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100	99,38
5-01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	99,66
5-01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	98,61
5-01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	99,43
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	100	99,44

Kode Rekening	Nama Program	Capaian Kinerja	
		Fisik (%)	Keuangan (%)
	DAERAH		
5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100	99,82
5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100	99,98
5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	99	97,45
5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100	100
	Jumlah	95	80,71

Berdasarkan Tabel 3.6 terdapat 5 (Lima) program terdiri dari 17 (Tujuh belas) kegiatan dan 67 (Enam Puluh Tujuh) Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan kinerja keuangan tahun 2023

3.3. Realisasi Fisik Anggaran Tahun 2023

Capaian sasaran yang telah ditargetkan Bappeda Provinsi Papua Tahun 2023 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun 2023.

Tabel 3.7

Alokasi Anggaran dan Realisasi Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.499.999.860,00	2.925.400.514,00	83,58
1-03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.499.999.860,00	2.925.400.514,00	83,58
1-03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.499.999.860,00	2.925.400.514,00	83,58
1-03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	3.499.999.860,00	2.925.400.514,00	83,58
1-03.12.1.01.002	Pelaksanaan Persetujuan Substansi.Evaluasi dan Penetapan RRTR	3.499.999.860,00	2.925.400.514,00	83,58
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	96.901.790.679,00	77.551.600.886,66	80,03
5-01	PERENCANAAN	93.401.790.679,00	74.626.200.372,66	79,89
5-01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51.076.467.277,00	32.788.309.396,66	64,19
5-01.01.1.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.080.875.000,00	1.075.334.715,00	99,49
5-01.01.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000,00	99.390.270,00	99,39
5-01.01.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50.000.000,00	49.050.000,00	98,10
5-01.01.1.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	45.875.000,00	45.871.100,00	99,99
5-01.01.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50.000.000,00	49.900.000,00	99,80
5-01.01.1.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	50.000.000,00	49.845.000,00	99,69
5-01.01.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	107.500.000,00	1.075.334.715,00	99,49
5-01.01.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	677.500.000,00	673.915.345	99,47
5-01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.925.383.047,00	22.753.104.571,00	55,60
5-01.01.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40.239.833.047,00	22.067.745.451,00	54,84
5-01.01.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	155.550.000,00	155.464.420,00	99,94
5-01.01.1.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	130.000.000,00	129.894.700,00	99,92
5-01.01.1.02.005	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
5-01.01.1.02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
5-01.01.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
5-01.01.1.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Pronogsis Realisasi Anggaran	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
5-01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	591.506.800,00	581.436.402,00	98,30
5-01.01.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	400.000.000,00	389.931.402,00	97,48
5-01.01.1.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	191.506.800,00	191.505.000,00	100,00
5-01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.174.374.630,00	6.155.236.614,00	99,69
5-01.01.1.06.002	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	351.074.630,00	343.509.630,00	97,85
5-01.01.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	620.000.000,00	619.941.950,00	99,99
5-01.01.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	700.000.000,00	698.912.300,00	99,84
5-01.01.1.06.008	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.000.000.000,00	999.735.333,00	99,97
5-01.01.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.755.000.000,00	2.753.652.281,00	99,95
5-01.01.1.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	748.300.000,00	739.484.120,00	98,82
5-01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.189.496.400,00	1.153.463.000,00	96,97
5-01.01.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	73.200.000,00	73.200.000,00	100,00
5-01.01.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.000.000,00	66.000.000,00	64,71
5-01.01.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.014.296.400,00	1.014.263.000,00	100,00
5-01.01.1.09	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1.114.831.400,00	1.069.735.094,00	95,95
5-01.01.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.831.400,00	113.097.000,00	98,49

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
5-01.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000.000,00	956.638.094,00	95,66
5-01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	18.250.869.273,00	17.911.492.628,00	98,14
5-01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	7.886.636.582,00	7.817.430.494,00	99,12
5-01.02.1.01.002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1.002.000.000,00	996.402.013,00	99,44
5-01.02.1.01.003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	527.101.582,00	525.680.220,00	99,73
5-01.02.1.01.004	Koodinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	140.800.000,00	140.709.965,00	99,94
5-01.02.1.01.005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	4.344.360.000,00	4.299.234.696,00	98,96
5-01.02.1.01.006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.872.375.000,00	1.855.403600,00	99,09
5-01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.399.799.596,00	3.389.990.619,00	99,71
5-01.02.1.02.001	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.537.866.566,00	1.529.940.142,00	99,48
5-01.02.1.02.002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	712.819.901,00	711.671.250,00	99,84
5-01.02.1.02.003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.149.113.120,00	1.148.379.227,00	99,94
5-01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	6.964.433.095,00	6.704.071.505,00	96,26
5-01.02.1.03.001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	3.394.347.040,00	3.320.835.025,00	97,83
5-01.02.1.03.002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	499.990.000,00	487.331.970,00	97,47
5-01.02.1.03.003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2.570.166.055,00	2.398.530.410,00	93,32
5-01.02.1.03.004	Fasilitasi /Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupten/Kota	499.930.000,00	497.374.110,00	99,49
5-01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	24.074.454.129,00	23.926.398.348,00	99,39
5-01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	10.299.999.500,00	10.264.572.257,00	99,66
5-01.03.1.01.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4.500.000.000,00	4.499.969.352,00	100,00
5-01.03.1.01.002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3.999.999.700,00	3.965.046.527,00	99,13
5-01.03.1.01.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	500.000.000,00	499.942.580,00	99,99
5-01.03.1.01.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	500.000.000,00	499.973.460,00	99,99
5-01.03.1.01.006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	299.999.800,00	299.936.390,00	99,98
5-01.03.1.01.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia	500.000.000	499.703.948,00	99,94
5-01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	4.199.764.572,00	4.141.565.027,00	98,61
5-01.03.1.02.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	460.000.000,00	458.759.800,00	99,73
5-01.03.1.02.002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1.074.795.607,00	1.074.210.660,00	99,95
5-01.03.1.02.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	500.000.000,00	446.242.660,00	89,25
5-01.03.1.02.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	639.969.065,00	639.860.613,00	99,98
5-01.03.1.02.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	425.000.000,00	424.654.090,00	99,92
5-01.03.1.02.006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	350.000.000,00	349.817.934,00	99,95
5-01.03.1.02.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	250.000.000,00	248.179.990,00	99,27
5-01.03.1.02.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	499.999.900,00	499.839.280,00	99,97
5-01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	9.574.690.057,00	9.520.261.064,00	99,43
5-01.03.1.03.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	804.990.675,00	804.630.060,00	99,96

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
	Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
5-01.03.1.03.002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1.339.996.325,00	1.339.827.545	99,99
5-01.03.1.03.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	999.999.325,00	999.970.901,00	100,00
5-01.03.1.03.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1.129.899.515,00	1.129.578.581,00	99,97
5-01.03.1.03.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	899.804.830,00	850.860.224,00	94,56
5-01.03.1.03.006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	299.999.735,00	299.272.750,00	99,76
5-01.03.1.03.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	599.999.537,00	599.752.116,00	99,95
5-01.03.1.03.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	3.499.999.800,00	3.496.395.887,00	99,90
5-05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.500.000.000,00	3.499.999.800,00	100,00
5-05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	900.000.000,00	898.395.957,00	99,82
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	900.000.000,00	898.395.957,00	99,82
5-05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	950.000.000,00	949.776.004,00	100,00
5-05.02.1.02.001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	250.000.000,00	249.984.840,00	99,99
5-05.02.1.02.006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	700.000.000,00	699.791.164,00	99,97
5-05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	700.000.000,00	682.164.590,00	97,45
5-05.02.1.03.007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	700.000.000,00	682.164.590,00	97,45
5-05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	950.000.000,00	949.991.570,00	100,00
5-05.02.1.04.003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	950.000.000,00	949.991.570,00	100,00
	JUMLAH	100.401.790.539,00	81.031.929.007,66	80,71

Sumber : Bappeda 2023